

PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Andi Muliani Sultani

Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru

adyanisultani@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba membangun sinergitas positif antara aspek aspek ekonomi dan strategi pembangunan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : menganalisis perkembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis ekonomi wilayah, dan menyusun strategi pengembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis aspek sosial budaya dan ekonomi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, indeks entropy, indeks Williamson, indeks Theil, indeks Gini, analisis Skalogram, analisis Location Quotient, analisis Shift Share dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan; Perkembangan wilayah Kabupaten Barru perkembangan wilayah berbasis ekonomi memiliki proporsi keragaman sektor perekonomian di Kabupaten Barru cukup baik. Tingginya tingkat kesenjangan pemerataan pendapatan penduduk. Dari tiga tipologi wilayah yang menjadi wilayah penelitian, pegunungan yang tertinggi kesenjangan penduduknya, disusul dataran rendah dan kemudian pesisir. Sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan dan menjadi aktivitas perekonomian primer di Kabupaten Barru tidak diimbangi oleh aktivitas sektor industri pengolahan.

Kata Kunci : pengembangan wilayah, ekonomi, daerah

A. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan implikasi gagasan berupa pendelegasian kekuasaan (*power of delegation*) kepada kepala daerah untuk membangun serta mengembangkan potensi wilayahnya secara bijak. Daerah mempunyai banyak peluang dalam ruang yang luas untuk merancang dan merealisasi usaha-usaha pembangunannya sendiri. Karena itu tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa kebijakan baru tentang desentralisasi ini sebenarnya mengarahkan pada proses pembangunan Indonesia yang berbasis daerah. Peran pemerintah daerah sebagai pilar penentu arah pengambilan kebijakan pembangunan sangat strategis, dan didukung oleh partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Selama 10 tahun otonomi daerah, Kabupaten Barru tercatat sebagai salah satu Kabupaten yang perkembangan wilayahnya lambat dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan jika ditilik dari sisi pembangunan fisik dan sisi keuangan daerahnya. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barru selama periode 2002-2011 sekitar 5,25% per tahun, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,65% per tahun. Dari sisi kontribusi nilai PDRB, PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2011

Andi Muliani Sultani, Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

sebesar Rp 1.904.306.680, hanya menyumbang sebesar 1,38% dari keseluruhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (BPS 2012). Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor.001/KEP/M-PDT/2005 juga menempatkan Kabupaten Barru menjadi salah satu dari 199 kabupaten tertinggal di Indonesia.

Dari sisi sosial yaitu nilai Indeks Perkembangan Manusia (IPM) juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barru berada pada peringkat ke-14 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan, IPM Kab. Barru masih di bawah rata-rata. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009, IPM Provinsi Sulawesi Selatan adalah 70,93 sedangkan IPM Kabupaten Barru tahun 2009 adalah 70,29. Begitupun pada tahun 2010, IPM Provinsi Sulawesi Selatan adalah 71,61 sedangkan IPM Kabupaten Barru adalah 70,86. Dari sini bisa disimpulkan bahwa indeks perkembangan manusia Kabupaten Barru masih rendah.

Namun Rustiadi *et al.* (2011) mengatakan secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “*Upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik*”. Dengan kata lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bisa diukur dari sisi pertumbuhan ekonomi atau fisik semata tetapi juga harus melihat aspek lain karena penilaian berdasarkan pertumbuhan ekonomi cenderung hanya mempertimbangkan sasaran-sasaran makro, yang pada dasarnya akan menimbulkan berbagai ketidakseimbangan pembangunan antara lain menajamnya disparitas spasial, kesenjangan desa-kota, kesenjangan struktural, dan sebagainya.

Pembangunan sebagai sebuah perubahan sosial yang terencana tidak bisa hanya dijelaskan secara kuantitatif dengan pendekatan ekonomi semata, tetapi terdapat aspek sosial budaya seperti persepsi, gaya hidup, motivasi dan budaya yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Pengembangan wilayah Kabupaten Barru haruslah mengakui dan melibatkan keadaan lokal, menumbuhkan potensi perkembangan yang ada dan dibangkitkan secara internal, kontribusi institusi dan pengetahuan lokal masyarakat Kabupaten Barru.

Kabupaten Barru yang memiliki 5 suku yaitu Bugis, Makassar, Bentong, Toraja dan Mandar, yang mendiami wilayah Barru memiliki nilai, budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses atau kaidah perencanaan dan pembangunan wilayah daerah Kabupaten Barru. Sumber identitas adalah moralitas agama dan sosial budaya yakni berupa etika kehidupan bersama (*common life*) yang universal diterapkan masyarakat Kabupaten Barru. *Common Life* ini semacam norma yang menjadi energi potensial dalam membina suasana keetnikan berlandaskan berbagai identitas, baik agama, budaya maupun etnis yang bila dikembangkan sedemikian rupa dapat menjembatani berbagai ikatan-ikatan primordial ataupun sejumlah perbedaan etnisitas, religiositas maupun sosiakultural lainnya. Ini kemudian menjadi *capital sosial* bagi masyarakat Barru, menumbuhkan solidaritas bersama (*common solidarity*) maupun kesadaran bersama (*common consciousness*) yang sangat berguna dalam keberlangsungan tatanan sosial dan dalam pengembangan

wilayah Kabupaten Barru. Terbaikannya pembangunan sumber daya sosial bisa menyebabkan lemahnya stok kapital sosial sehingga menekan produktivitas kerja dan mendorong terbangunnya jaringan kerja yang tidak efisien, lemahnya norma serta hilangnya nilai-nilai bersama yang akhirnya merugikan semua pihak yang berinteraksi dalam proses pembangunan.

Pengembangan wilayah seharusnya tidak lagi hanya sebagai penghormatan terhadap masalah memodernisasikan masyarakat yang tradisional, tidak lagi semata sebagai duplikasi intensifikasi energi dan sumberdaya alam, pembangunan yang terpisah dari pembangunan masyarakat. Pengembangan wilayah Kabupaten Barru haruslah mengakui dan melibatkan keadaan lokal, menumbuhkan potensi perkembangan yang ada dan dibangkitkan secara internal, kontribusi institusi dan pengetahuan lokal masyarakat Kabupaten Barru. Keadaan ini harus inheren secara erat dengan keberlanjutan pembangunan.

Berangkat dari pemikiran di atas, penelitian ini kemudian mencoba membangun sinergitas aspek ekonomi dan strategi pembangunan dengan tujuan menganalisis perkembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis ekonomi wilayah dan menyusun strategi pengembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis aspek sosial budaya dan ekonomi.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Barru yang terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat $4^{\circ} 05' 49''$ LS - $4^{\circ} 47' 35''$ LS dan $119^{\circ} 35' 00''$ BT - $119^{\circ} 49' 16''$ BT. Sebelah utara Kabupaten Barru berbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah timur berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, sebelah selatan berbatasan Kabupaten Pangkep, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Adapun wilayah Kabupaten Barru dalam penelitian ini dibagi berdasarkan tipologi wilayah yaitu (1) Wilayah Pegunungan, (2) Wilayah Pesisir, dan (3) Wilayah Dataran Rendah. Pelaksanaan penelitian meliputi persiapan penelitian, pengumpulan data, tabulasi dan analisis data, penyusunan arahan pengembangan dan penyusunan tesis dilakukan pada bulan Mei sampai dengan September 2013.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut: data Sekunder, meliputi Peta Administrasi Kabupaten Barru, Data Jumlah penduduk Kabupaten Barru, PDRB Kabupaten Barru 2007-2011, PDRB Perkecamatan Kabupaten Barru tahun 2007 dan 2010, Data Pendapatan per Rumah Tangga di Tiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru Tahun 2011, Data Infrastruktur Kabupaten Barru Tahun 2011, Data Komoditas sub sektor pada Sektor Pertanian Kabupaten Barru tahun 2012.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : **Indeks Gini**, yaitu indeks yang digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Barru. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai indeks gini 0 (nol) artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan nilai 1 (satu) artinya ketimpangan sempurna (Panuju (2012)); **Indeks Entropy**, yaitu Indeks

Perkembangan Ekonomi Wilayah untuk melihat seberapa jauh tingkat perkembangan suatu wilayah dibanding kemampuan maksimumnya (Panuju 2012). Data yang digunakan untuk menghitung indeks entropy adalah nilai PDRB perkecamatan di Kabupaten Barru;

Selanjutnya **Analisis Skalogram**, yaitu analisis Pusat Dan Hirarki Pelayanan dimana seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya. Penelitian ini menggunakan data Potensi Desa Kab. Barru tahun 2011 dengan parameter yang diukur meliputi bidang sarana perekonomian, sarana komunikasi dan informasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan terhadap jumlah penduduk tiap desa di Kabupaten Barru; **Indeks Williamson**, merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika $Y_i = Y$ maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten (Rustiadi *et al.* 2011).

Kemudian **Analisis Location Quotient (LQ)**, yaitu analisis untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis (aktifitas). LQ merupakan suatu indeks yang digunakan untuk membandingkan pangsa suatu aktivitas tertentu (i) dalam wilayah tertentu (j) dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Secara sederhana, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas (i) pada sub wilayah ke-j terhadap persentase total aktivitas di seluruh wilayah (Panuju 2012). Kriteria yang muncul dari perhitungan ini adalah: (a) Jika $LQ > 1$: Sektor basis artinya komoditas j di daerah penelitian memiliki keunggulan komparatif. (b) Jika $LQ = 1$: Sektor non basis artinya komoditas j di daerah penelitian tidak memiliki keunggulan, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah bersangkutan. (c) Jika $LQ < 1$: Sektor non basis artinya komoditas j di daerah penelitian tidak dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri sehingga diperlukan pasokan dari luar daerah; dan **Analisis SWOT**, yaitu suatu alat perencanaan strategis untuk mengungkapkan dua faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prospek Ekonomi

Pengembangan wilayah dari pendekatan ekonomi untuk Kabupaten Barru dapat dilihat pada perkembangan ekonomi wilayah, indeks kesenjangan pendapatan masyarakat, disparitas wilayah, identifikasi sub-sub wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan yang bisa dijadikan sebagai penggerak

pertumbuhan ekonomi wilayah disekitarnya, dan identifikasi sektor dan sub-sektor ekonomi basis (unggulan).

a. Perkembangan Ekonomi Wilayah

Dengan memakai data PDRB per kecamatan pada empat titik tahun yaitu tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 maka didapatkan nilai indeks entropy Kabupaten Barru yang secara umum menyorot bagaimana kinerja pembangunan ekonomi wilayah. Adapun hasil Indeks Entropi Kabupaten Barru yaitu: (1) Tahun 2007 sebesar 0,838, (2) Tahun 2008 sebesar 0,842, (3) Tahun 2009 sebesar 0,847, dan (4) Tahun 2010 sebesar 0,850.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa: (1) Indeks entropi Kabupaten Barru yang berkisar antara 0.835–0.850 berarti cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, secara umum perkembangan proporsi keragaman sektor perekonomian di Kabupaten Barru cukup baik; (2) Melihat nilai indeks entropi yang dari tahun ke tahun peningkatannya tidak terlalu signifikan ini mengindikasikan secara umum perkembangan komposisi sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Barru tidak banyak mengalami perubahan.

b. Disparitas Wilayah

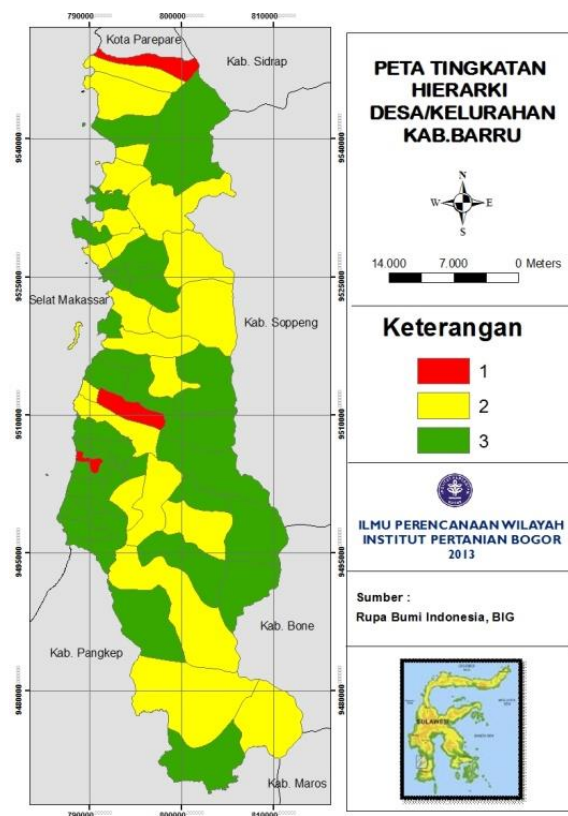
Berdasarkan hasil analisis indeks Williamson dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, dapat dilihat bahwa tingkat disparitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Barru pada tahun 2007 sebesar 0,215 turun pada tahun 2010 yang nilainya 0,213. Ini tidak berarti banyak karena meskipun nilai indeks turun yang mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat disparitas namun turunnya disparitas antar wilayah tidak terlalu besar. Dari data ini bisa dikatakan bahwa kinerja pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi wilayah belum dapat menekan terjadinya disparitas antar wilayah secara baik.

Sementara itu dari sisi ketersediaan infrastruktur, penelitian ini dengan menggunakan analisis skalogram juga melihat tingkat perkembangan desa-desa dari sisi keberadaan infrastruktur di tiga tipologi wilayah di Kabupaten Barru. Dimana tingkat perkembangan desa dicerminkan oleh nilai Indeks Perkembangan Wilayah (IPW), umumnya semakin tinggi nilai IPW, semakin tinggi pula kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPW berarti semakin rendah kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Secara spasial hasil perhitungan skalogram dengan tiga hirarki dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Berdasarkan gambar 1 terlihat penyebaran tingkat hirarki wilayah dari hasil analisis skalogram dimana tiga tingkatan hirarki dijelaskan sebagai berikut: (1) Tingkat hirarki I (tinggi) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan tinggi. Terdapat tiga (3) desa/kelurahan yang termasuk dalam hirarki I, atau hanya sekitar 5.56% desa/kelurahan dari seluruh jumlah desa yang ada di Kabupaten Barru. Hirarki I umumnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang lebih tinggi, lebih lengkap, dan tentunya lebih memadai daripada desa/kelurahan dengan hirarki yang lebih rendah (hirarki II dan III), aksesibilitas masing-masing wilayah desa terhadap pusat pelayanan maupun terhadap pusat pemerintahan relatif dekat. (2) Tingkat hirarki II (sedang) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan sedang.

Andi Muliani Sultani, Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Terdapat 21 desa atau sekitar 38,89% dari seluruh jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Barru. Adapun wilayah desa/kelurahan dengan tingkat hirarki II berarti ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut lebih sedikit dari hirarki I dan umumnya tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan wilayah di hirarki I. (3) Tingkat hirarki III (rendah) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan rendah. Terdapat 30 desa/kelurahan atau sekitar 55,56% dari seluruh jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barru. Desa/kelurahan pada tingkat hirarki III pada umumnya memiliki tingkat kehidupan yang relatif kurang maju, ketersediaan sarana dan prasarana di desa-desa tersebut relatif kurang, dan akses masing-masing desa ke pusat-pusat pelayanan maupun pusat-pusat aktivitas pemerintahan relatif lebih sulit.



Gambar 1. Peta Tingkatan Hirarki Desa/Kelurahan Kab. Barru

Adapun penyebaran ketersediaan infrastruktur berdasarkan Tipologi wilayah dapat yaitu: (1) Wilayah Pegunungan, wilayah ini tidak memiliki desa yang berhirarki 1, 5 desa yang berhirarki 2 dan 8 desa yang berhirarki tiga, dengan rata-rata IPW sebesar 16,42, (2) Wilayah Pesisir, wilayah ini memiliki 2 desa berhirarki 1, 10 desa berhirarki 2 dan 17 desa berhirarki 3, dengan rata-rata IPW sebesar 18,52, dan (3) Wilayah Dataran Rendah, wilayah ini memiliki 1 desa berhirarki 1, 6 desa berhirarki 2 dan 5 desa berhirarki 3, dengan rata-rata IPW sebesar 22, 32.

Andi Muliani Sultani, Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa untuk daerah pegunungan relatif tertinggal ketersediaan infrastrukturnya jika dibandingkan dengan dua wilayah lainnya, yaitu pesisir dan dataran rendah. Dari sisi distribusi pembangunan dalam hal ini infrastruktur, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru belum mencapai tujuan pembangunan yang menekankan equity atau pemerataan pembangunan antar wilayah, terlihat dari belum meratanya pembangunan infrastruktur.

c. Kesenjangan Pendapatan Masyarakat

Dengan menggunakan data pendapatan per Rumah Tangga di olah dengan indeks Gini, ditemukan fakta bahwa secara makro Kabupaten Barru tingkat kesenjangan pendapatannya sebesar 0,541, lebih rendah dari tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan secara umum yang menyentuh angka 0,613. Kabupaten Barru menempati posisi keenam untuk tingkat kesenjangan pendapatan terendah, namun angka ini juga memperlihatkan bahwa kesenjangan pendapatan antar rumah tangga di Kabupaten Barru tergolong tinggi yang berarti distribusi pendapatan di Kabupaten Barru tidak merata.

Adapun tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat kabupaten Barru berdasarkan tipologi wilayah yaitu: (1) Wilayah Pegunungan sebesar 0,689, (2) Wilayah Dataran Rendah sebesar 0,591, dan (3) Wilayah Pesisir sebesar 0,450. Dari angka ini terlihat bahwa tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat tertinggi adalah wilayah pegunungan. Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan pendapatan pada tipologi wilayah ini adalah perbedaan jenis mata pencaharian penduduk. Di wilayah pegunungan jenis mata pencaharian kurang variatif dan lebih banyak pada sektor pertanian, sementara di satu sisi pada wilayah ini petani terbagi atas pemilik tanah dan petani penggarap. Sedangkan, untuk wilayah dataran rendah dan pesisir lapangan dan jenis pekerjaan penduduknya lebih variatif dan lebih banyak terkonsentrasi pada sektor sekunder dan tersier.

d. Sub Sektor Komoditi Unggulan

Penelitian ini menggunakan analisis LQ dengan data PDRB kecamatan tahun 2010 menemukan fakta bahwa Sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan/basis di Kabupaten Barru. Namun, sektor pertanian ternyata tidak diimbangi oleh aktivitas sektor industri pengolahan, ini kemudian menyebabkan sebagian besar hasil-hasil pertanian di wilayah Kabupaten Barru cenderung langsung dijual ke wilayah lain tanpa diolah terlebih dahulu sehingga tidak menghasilkan nilai tambah. Idealnya, sektor pertanian hendaknya dapat dijadikan salah satu aspek daya saing bagi Kabupaten Barru yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Selanjutnya berdasarkan tipologi wilayah untuk sektor unggulan pertanian dilakukan analisis LQ untuk mengetahui komoditas yang menjadi sub sektor unggulan. Adapun komoditas sub sektor pada sektor pertanian berdasarkan tipologi wilayah bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komoditi unggulan Sub Sektor pada Sektor pertanian

Tipologi wilayah	Komoditi Unggulan				
	Pertanian Pangan	Perkebunan	Tanaman Holtikultura	Peternakan	Perikanan
Pegunungan	Padi, Jagung, Kacang	Kopi, jambu mente	Tomat, Cabe	Sapi	-
Dataran Rendah	Padi, Jagung, kacang	Kelapa	Tomat, Cabe	Sapi, Ayam Buras, Itik	Perikanan Darat
Pesisir	Padi, jagung, kacang, Ubi Kayu	Kelapa, Jambu Mente	Semangka, Melon	Sapi, Ayam Buras, Itik	Perikanan Darat, perikanan laut

Sumber : Analisis, 2014

Pada tabel 1 di atas terlihat komoditi unggulan di tiap sub sektor di sektor pertanian yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan bagaimana kemudian sub sektor tersebut menjadi sektor basis yang menciptakan multiplier effect bagi sektor ekonomi lainnya dan menjadi sektor bagi prospek perekonomian di Kabupaten Barru ke depannya. Hasil analisis menggunakan pendekatan ekonomi terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barru masih perlu memaksimalkan kinerja untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru.

Selain itu yang harus jadi perhatian pemerintah adalah pengawasan dalam implementasi kebijakan pembangunan. Kecendrungan yang terjadi adalah kebijakan-kebijakan pembangunan terlebih pada bidang ekonomi mengalami trickle down effect yang berarti hasil-hasil pembangunan hanya bisa dinikmati sebagian orang tetapi oleh masyarakat keseluruhan tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang diharapkan.

2. Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Barru

Dalam usaha pembangunan, diperlukan tekad bagi semua stakeholders untuk maju bersama demi mencapai pembangunan yang berkualitas, begitupun Kabupaten Barru. Pembangunan Kabupaten Barru memerlukan terobosan-terobosan untuk mencapai pembangunan yang berkualitas dan berimbang. Pada penelitian ini dengan menggunakan analisis SWOT dan memasukkan hasil analisis pada pemaparan sebelumnya dan memadumadankan dengan kebijakan eksisting, akhirnya melahirkan formulasi strategi pengembangan wilayah Kabupaten Barru kedepannya. Adapun strategi pengembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis Pendekatan Ekonomi Wilayah Kabupaten Barru, yaitu :

a. Strategi Pengembangan wilayah Kabupaten Barru pada aras Makro

Mensinergikan *stakeholder* dalam setiap proses pembangunan dari mulai perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, terutama melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan baik. Menyusun kebijakan pembangunan yang pro masyarakat desa dengan menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan bagi masyarakat miskin. Mendorong terbangunnya hubungan kerja yang harmonis dan egaliter antara pemerintahan desa dengan organisasi-organisasi masyarakat yang ada sebagai embrio terbentuknya pemerintahan desa yang demokratis, dan meningkatkan

kualitas ketiganya sehingga bisa menjadi *agen of control* bagi terbangunnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat bagi pengembangan wilayah kedepannya, dan mengembangkan sektor pertanian melalui peningkatan SDM, Teknologi, Permodalan dan akses pasar yang didukung dengan pengembangan sektor industri pengolahan berbasis hasil-hasil pertanian.

b. Strategi Pengembangan wilayah Kabupaten Barru pada aras Mikro

Strategi Pengembangan wilayah Kabupaten Barru pada aras Mikro berdasarkan tipologi wilayah, yaitu :

1. Wilayah Dataran Rendah

Strategi untuk dataran rendah meliputi: (1) Upaya memperkuat jati diri daerah, norma-norma dan tata nilai dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai budaya. Salah satu cara adalah memasukkan muatan budi pekerti kedalam kurikulum mata pelajaran di lingkungan pendidikan demi meminimalkan terjadinya degradasi norma, (2) Pengembangan Komoditi unggulan pada (1) Sub Sektor Tanaman Pangan adalah ; Padi, Jagung dan Kacang; (2) Sub Sektor perkebunan adalah Kelapa; (3) Sub Sektor Tanaman Holtikultura adalah cabe dan Tomat; dan (4) Sub Sektor Peternakan adalah Sapi, Ayam Buras dan Itik.

2. Wilayah Pesisir

Strategi untuk pesisir meliputi: (1) Mengingat wilayah pesisir adalah wilayah yang sangat heterogen dibanding dua wilayah lainnya maka diperlukan penguatan nilai dan norma sebagai peredam konflik antar etnis, (2) Pengembangan Komoditi unggulan pada (1) Sub Sektor Tanaman Pangan adalah ; Padi, Jagung, Kacang dan Ubi Kayu; (2) Sub Sektor perkebunan adalah Kelapa dan Jambu Menteng; (3) Sub Sektor Tanaman Holtikultura adalah semangka dan Melon; dan (4) Sub Sektor Peternakan adalah Sapi, Ayam Buras, dan itik.

3. Wilayah Pegunungan

Strategi untuk pegunungan meliputi: (1) Meningkatkan kondisi infrastruktur pembangunan sehingga akan memperbaiki kemampuan produksi di sektor pertanian. Untuk meningkatkan interaksi desa – kota, diperlukan pembangunan jaringan infrastruktur secara merata, (2) Pengembangan Komoditi unggulan pada (1) Sub Sektor Tanaman Pangan adalah ; Padi, Jagung dan Kacang; (2) Sub Sektor perkebunan adalah Kopi dan Jambu Menteng; (3) Sub Sektor Tanaman Holtikultura adalah cabe dan Tomat; dan (4) Sub Sektor Sektor Peternakan adalah Sapi.

D. PENUTUP

Perkembangan wilayah berbasis sosial budaya : (1) Terjadi akulturasi budaya antara suku Bugis yang merupakan suku mayoritas dengan suku lain, (2) Kelembagaan lokal Kabupaten Barru berupa aturan main meliputi budaya Siri' masih terjaga dengan kuat dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan kelembagaan lokal berupa institusi adalah Pemerintah desa beserta perangkatnya yaitu BPD dan LKD kinerjanya masih rendah. (3) Kapital sosial yang dimiliki masyarakat Kabupaten Barru masih dikategorikan tinggi, namun terjadi degradasi norma dan tata nilai terutama di wilayah Dataran rendah.

Perkembangan wilayah berbasis Ekonomi wilayah : (1) Indeks entropi Kabupaten Barru yang berkisar antara 0.835–0.850, yang berarti cukup tinggi, artinya secara umum perkembangan proporsi keragaman sektor perekonomian di

Andi Muliani Sultani, Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Barru cukup baik, meskipun tidak banyak mengalami perubahan. (2) Nilai koefisien Gini sebesar 0,54 mengindikasikan tingginya tingkat kesenjangan pemerataan pendapatan penduduk. Dari tiga tipologi wilayah yang menjadi wilayah penelitian, pegunungan yang tertinggi kesenjangan penduduknya, disusul dataran rendah dan kemudian pesisir. (3) Adanya disparitas wilayah yang terjadi akibat tidak meratanya aktivitas perekonomian. (4) Adanya perbedaan dalam akses terhadap layanan, untuk wilayah pegunungan yang akses layanan lebih sulit dicapai dibanding dua wilayah tipologi yaitu pesisir dan dataran rendah. (5) Sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan dan menjadi aktivitas perekonomian primer di Kabupaten Barru tidak diimbangi oleh aktivitas sektor industri pengolahan bagi hasil-hasil pertanian. Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis Pendekatan Sosial Budaya dan Ekonomi Wilayah Kabupaten Barru di bagi atas dua, yaitu pada aras makro dan pada aras mikro berdasarkan tipologi wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan pada Pemerintah Kabupaten Barru lebih mengembangkan dan menyertakan kapital sosial dalam setiap kegiatan pembangunan untuk menumbuhkan inisiatif dan dinamika masyarakat sehingga tumbuh rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus meningkatkan peranan sebagai pengayom masyarakat dalam bentuk pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, dengan memiliki kebijakan yang strategis, terpadu, dan jelas yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2011. Barru dalam angka. Barru: Badan Pusat Statistik.
- Dharmawan, AH *et.al*, 2006. Pembaruan Tata Pemerintahan Desa berbasis Lokalitas dan Kemitraan. Jakarta : Kencana, Prenada Media Group.
- Mattulada, 1998. Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Ujungpandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Panuju, DR, 2012. Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rustiadi, *et.al*, 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press.
- Vipriyanti, NU, 2007. Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan Antara Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi Wilayah, Studi Kasus di Empat Kabupaten di Provinsi Bali. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Wasistiono S & Irwan, T, 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media.